

**PERAN KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER DAERAH DALAM MENDUKUNG
PENGEMBANGAN EKOWISATA MANGROVE SEBAGAI BAGIAN DARI
EKONOMI BERKELANJUTAN**

Tamam Rosid

Ekonomi Pembangunan , Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Berau Kalimantan Timur, Indonesia
E-mail: tamamrosid77@gmail.com

Abstrack

This study aims to determine the role of regional fiscal and monetary policies in supporting the development of Mangrove Ecotourism as part of a sustainable economy. The type of research used in this research is a qualitative approach with a library research method. This data collection technique uses the “literature study” technique or literature review research by attempting to review or observe data derived from journals, websites and other information media. Data analysis used content analysis techniques, which involved re-reading the literature to identify the main themes and categories that emerged from the literature. The result of this study is that government support is provided in the form of utilizing fiscal and monetary policies in order to support conservation efforts. Fiscal policy has an important role to play in maintaining mangrove biodiversity. Meanwhile, monetary policy is used to control the macroeconomic situation so that it can run as desired through regulating the amount of money circulating in the economy. These efforts are carried out in order to stabilize prices and inflation. To encourage local communities to support conservation efforts, fiscal incentives can be provided. Such as tax incentives for ecotourism income, reduction of local tax rates (hotel or restaurant) for ecotourism businesses, subsidies for the construction of homestays based on environmentally friendly materials. Meanwhile, in the long term, an incentive scheme can be launched in the form of a tax reduction on income obtained from reforestation.

Keywords: Fiscal and Monetary Policy, Mangrove Ecotourism, Sustainable Economy

1. PENDAHULUAN

Ekosistem mangrove merupakan sumberdaya alam daerah tropika yang mempunyai manfaat ganda baik aspek ekologi maupun sosial ekonomi. Besarnya peranan ekosistem mangrove bagi kehidupan dapat diketahui dari banyaknya jenis hewan, baik yang hidup di perairan, di atas lahan maupun di tajuk-tajuk pohon mangrove serta ketergantungan manusia terhadap ekosistem mangrove tersebut. Mangrove merupakan sumber daya yang dapat dipulihkan (*renewable resources*) yang menyediakan berbagai jenis produk (produk langsung dan produk tidak langsung) dan pelayanan lingkungan seperti proteksi terhadap abrasi, pengendali intrusi air laut, mengurangi tiupan angin kencang, mengurangi tinggi dan kecepatan arus gelombang, rekreasi dan pembersih air dari polutan Kusmana (2010). Manfaat ekosistem mangrove yang berhubungan dengan fungsi fisik adalah sebagai mitigasi bencana seperti peredam gelombang dan angin badai bagi daerah yang ada di belakangnya, pelindung

pantai dari abrasi, gelombang air pasang (rob), tsunami, penahan lumpur dan perangkap sedimen yang diangkut oleh aliran air permukaan, pencegah intrusi air laut ke daratan, serta dapat menjadi penetralisir pencemaran perairan pada batas tertentu Lasibani and Eni (2009).

Ekosistem mangrove di Indonesia memiliki tingkat keanekaragaman jenis yang tertinggi di dunia. Sejauh ini di Indonesia tercatat ada 202 jenis tumbuhan mangrove yang terdiri dari 89 jenis pohon, 5 jenis palem, 19 jenis tumbuhan memanjat (liana), 44 jenis herba tanah, 44 jenis epifit, dan 1 jenis tumbuhan paku. Dari 202 jenis tersebut, 43 jenis yang merupakan mangrove sejati (true mangrove). Hutan Mangrove mempunyai beberapa kiprah baik secara ekologi, fisik, juga ekonomi yang sangat menunjang pemenuhan kebutuhan hidup insan. Hutan mangrove berperan penting untuk penahan erosi dan tempat tinggal biota laut, selain itu hutan mangrove sebagai daya tarik wisata, khususnya ekowisata yang menawarkan konsep pendidikan dan konservasi. Ekowisata merupakan salah satu alternatif program yang dapat diterapkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat sebagai upaya yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kerusakan ekosistem mangrove. Ekowisata telah menjadi sebuah alat baru untuk mempromosikan pariwisata dan budaya ramah lingkungan agar lebih menarik. Selain itu, ekowisata mangrove dapat membantu kegiatan konservasi sumberdaya dan pengembangan masyarakat. Ekowisata merupakan bentuk pariwisata yang tidak hanya menekankan pada aspek rekreasi, tetapi juga mengintegrasikan prinsip pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat lokal. Salah satu ciri khas dari ekowisata adalah perlunya sistem manajemen yang adaptif dan berkelanjutan agar kegiatan wisata tidak berdampak negatif terhadap lingkungan alami yang menjadi daya tarik utamanya. Sebagaimana dijelaskan oleh Handoko et al. (2023), pengelolaan ekowisata memerlukan strategi yang dapat menyeimbangkan antara pemanfaatan dan konservasi sumber daya, sehingga wisatawan dapat menikmati pengalaman alam yang autentik tanpa merusak ekosistem yang ada. Khususnya di wilayah pesisir, kawasan hutan mangrove sangat rentan terhadap tekanan akibat aktivitas wisata yang tidak terkontrol. Zulia et al. (2019) mengungkapkan bahwa tanpa pengelolaan yang berbasis daya dukung lingkungan, aktivitas wisata di kawasan pesisir dapat menyebabkan penurunan kualitas ekosistem mangrove, baik dari sisi keragaman hayati maupun fungsi ekologisnya. Oleh karena itu, pendekatan daya dukung (carrying capacity approach) menjadi sangat penting untuk diterapkan dalam tata kelola ekowisata. Pendekatan ini tidak hanya mengatur jumlah kunjungan wisatawan yang ideal, tetapi juga memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan ekologis agar dampak negatif dapat diminimalkan secara signifikan.

Mutiara et al. (2024) menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan ekowisata berbasis daya dukung sangat dipengaruhi oleh sinergi antara pemerintah, masyarakat lokal, dan pelaku usaha. Keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga kelestarian kawasan dan mengelola destinasi secara mandiri dapat menciptakan rasa memiliki, sekaligus memastikan bahwa pembangunan pariwisata tidak bertentangan dengan tujuan pelestarian lingkungan. Dengan demikian, ekowisata yang dikelola secara bijak tidak hanya menjaga kelestarian alam, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dengan melihat beberapa permasalahan pengelolaan ekowisata, hal ini tidak dapat diabaikan begitu saja karena akan menimbulkan dampak yang buruk bagi lingkungan ekowisata itu sendiri. Konsep ekowisata harus dikembalikan pada prinsipnya, yakni melestarikan karakteristik lingkungan, memberikan edukasi, melibatkan masyarakat lokal

serta meningkatkan ekonomi masyarakat lokal. Menurut Mathieson dan Wall, keberadaan ekonomi pariwisata dapat memberikan dampak negative salah satunya adalah meningkatkan angka inflasi dan meroketnya harga tanah. Peningkatan inflasi dapat terjadi di lokasi wisata karena pelaku bisnis menetapkan harga yang sama untuk wisatawan asing dan penduduk lokal yang berimplikasi pada peningkatan biaya hidup penduduk lokal dan semakin lama akan memarjinalkan mereka. Untuk itu, perlu adanya konsep pengelolaan ekowisata yang baik dan bertanggungjawab serta pengelolaan ekowisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditentukan dengan menentukan kebijakan fiskal dan moneter.

Kebijakan fiskal diterapkan oleh pemerintah sebagai bukti untuk mengatur jalannya perekonomian negara Indonesia. Ketika perekonomian mengalami kontraksi atau resesi, kebijakan fiskal ekspansif sering digunakan untuk meningkatkan permintaan agregat melalui peningkatan pengeluaran negara atau pengurangan pajak, yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, saat perekonomian menunjukkan tanda-tanda overheating atau inflasi tinggi, kebijakan fiskal kontraktif, seperti pengurangan belanja negara atau peningkatan pajak, digunakan untuk mengurangi tekanan inflasi dan menjaga keseimbangan fiskal (Mutiara et al., 2024). Disisi lain Kebijakan moneter (*monetary policy*) adalah suatu usaha dalam mengendalikn keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Usaha tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan harga dan inflasi. Hasil penelitian (Okri Handoko et al., 2023) menemukan bahwa kombinasi antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter yang tepat dapat membantu mencapai stabilitas ekonomi makro di Indonesia. Sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi makro. Keduanya tidak dapat bekerja secara terpisah karena dampak kebijakan yang diambil di salah satu sektor dapat mempengaruhi sektor lainnya.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan, perlu dilakukannya penelitian untuk mengetahui peran kebijakan fiskal dan moneter daerah dalam mendukung pengembangan Ekowisata Mangrove sebagai bagian dari ekonomi berkelanjutan.

2. KERANGKA TEORI

Ekowisata Mangrove

Ekowisata merupakan bentuk pariwisata yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial, yang bertujuan untuk melestarikan keanekaragaman hayati serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, ekowisata menjadi alternatif strategis karena tidak hanya menawarkan nilai ekonomi, tetapi juga berfungsi sebagai sarana edukasi dan konservasi lingkungan (Mutiara et al., 2024). Ekowisata yang dikelola dengan prinsip keberlanjutan dapat menjawab tantangan degradasi lingkungan dan sekaligus menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah pesisir seperti kawasan mangrove.

Ekosistem mangrove memiliki peran ekologis yang sangat penting, khususnya sebagai pelindung pantai dari abrasi, tsunami, dan intrusi air laut. Hutan mangrove juga berfungsi sebagai penahan lumpur, perangkap sedimen, serta pelindung terhadap angin kencang dan gelombang tinggi, yang menjadikannya sebagai benteng alami dari bencana pesisir (Zulia et al., 2019). Selain fungsi fisiknya, mangrove juga berperan sebagai penyedia berbagai jasa ekosistem, termasuk sebagai tempat budidaya perikanan, penghasil bahan baku

industri (seperti kayu dan daun nipah), dan sebagai objek wisata berbasis alam yang memiliki nilai edukatif tinggi (Wardhani, 2011; Okri Handoko et al., 2023).

Dalam pengembangan ekowisata berbasis konservasi, masyarakat lokal memegang peranan penting baik sebagai pelaku maupun penerima manfaat. Program-program ekowisata yang melibatkan masyarakat dapat mendorong terbentuknya kesadaran ekologis dan kepedulian terhadap keberlanjutan lingkungan. Insentif fiskal dan dukungan kebijakan pemerintah daerah, seperti pengurangan pajak penghasilan dari kegiatan ekowisata dan subsidi pembangunan fasilitas wisata ramah lingkungan, menjadi instrumen pendukung yang esensial (Okri Handoko et al., 2023; Mutiara et al., 2024). Dengan pendekatan tersebut, ekowisata mangrove tidak hanya mampu menjaga kelestarian ekosistem, tetapi juga berperan aktif dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Kebijakan Fiskal Daerah

Kebijakan fiskal merupakan instrumen penting yang digunakan oleh pemerintah untuk mengelola perekonomian melalui pengaturan penerimaan negara (seperti pajak) dan pengeluaran negara (seperti subsidi dan belanja publik). Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk menciptakan stabilitas ekonomi, mendorong pertumbuhan, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat (Mutiara et al., 2024). Dalam konteks pengembangan ekowisata, khususnya ekowisata mangrove yang berbasis konservasi dan keberlanjutan lingkungan, kebijakan fiskal memainkan peran strategis dalam mendorong keterlibatan sektor swasta dan masyarakat lokal melalui pemberian insentif ekonomi yang tepat sasaran.

Salah satu bentuk implementasi kebijakan fiskal dalam mendukung ekowisata adalah melalui pemberian insentif fiskal seperti pengurangan pajak daerah bagi pelaku usaha pariwisata, termasuk hotel dan restoran yang berbasis ramah lingkungan. Selain itu, subsidi untuk pembangunan homestay yang menggunakan bahan lokal dan teknologi ramah lingkungan juga menjadi bentuk dukungan yang relevan dalam memperkuat sektor pariwisata berbasis komunitas (Handoko et al., 2023). Di sisi lain, untuk menciptakan efek jangka panjang yang berkelanjutan, pemerintah dapat memberikan insentif pajak terhadap pendapatan yang diperoleh dari aktivitas konservasi dan reforestasi, sehingga mendorong pelaku usaha dan masyarakat untuk lebih aktif dalam menjaga kelestarian ekosistem mangrove (Putri & Siregar, 2022).

Dari sisi regulasi, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa kebijakan penting yang mendukung konservasi melalui mekanisme fiskal. Misalnya, Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 Tahun 2019 memberikan *tax allowance* bagi investor di sektor kehutanan, termasuk investasi yang berkaitan dengan pelestarian ekosistem mangrove. Selain itu, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 198/PMK.010/2019 dan PMK No. 219/PMK.011/2012 menetapkan pembebasan bea masuk atas impor barang dan jasa untuk kepentingan konservasi, serta memungkinkan pengurangan beban pajak melalui deductible expense atas biaya penanaman kembali (reboisasi) kawasan hutan (Kementerian Keuangan, 2023). Kebijakan ini menegaskan bahwa pendekatan fiskal tidak hanya berfungsi sebagai alat stabilisasi ekonomi makro, tetapi juga sebagai instrumen yang mampu mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal dan sektoral.

•

Kebijakan Moneter Daerah

Kebijakan moneter merupakan salah satu instrumen penting dalam pengelolaan ekonomi makro yang dilakukan oleh otoritas moneter, seperti bank sentral, dengan tujuan utama mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat. Tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas harga, mengendalikan inflasi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Okri Handoko et al., 2023). Dalam konteks pembangunan pariwisata berbasis alam seperti ekowisata mangrove, stabilitas ekonomi makro yang dijaga melalui kebijakan moneter menjadi prasyarat penting bagi terciptanya lingkungan usaha yang kondusif, baik bagi pelaku usaha lokal maupun investor.

Stabilitas harga yang terkendali melalui pengaturan inflasi memberikan kepastian usaha bagi sektor pariwisata, terutama dalam hal pengelolaan biaya operasional, harga barang dan jasa pariwisata, serta investasi jangka panjang. Selain itu, kebijakan moneter yang efektif dapat meningkatkan daya beli masyarakat lokal dengan menekan inflasi yang berlebihan, sehingga mendorong konsumsi domestik, termasuk kunjungan wisata lokal ke kawasan ekowisata (Putra & Lestari, 2022). Dengan demikian, kebijakan moneter berkontribusi langsung terhadap peningkatan aktivitas ekonomi di daerah wisata, terutama yang berbasis komunitas dan konservasi lingkungan.

Lebih jauh, sinergi antara kebijakan moneter dan sektor riil sangat penting dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan. Sebagaimana dijelaskan oleh Rahmawati dan Yusuf (2021), kestabilan ekonomi makro yang tercipta dari kebijakan moneter yang kredibel dapat menciptakan rasa aman dan kepercayaan investor terhadap sektor pariwisata ramah lingkungan. Oleh karena itu, peran kebijakan moneter tidak hanya terbatas pada pengendalian inflasi, tetapi juga menjadi penopang penting dalam menciptakan iklim usaha yang stabil, adil, dan berdaya saing, termasuk di sektor ekowisata mangrove yang berbasis konservasi dan kearifan lokal.

Sinergi Kebijakan Fiskal dan Moneter

Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter merupakan dua instrumen utama dalam pengelolaan ekonomi makro yang memiliki hubungan saling melengkapi dan tidak dapat berjalan secara terpisah. Keduanya memainkan peran strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi, mengendalikan inflasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Okri Handoko et al. (2023) menekankan bahwa sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter sangat penting karena kebijakan di satu sektor dapat memberikan dampak langsung maupun tidak langsung terhadap sektor lainnya. Misalnya, peningkatan pengeluaran pemerintah (fiskal) dapat memicu peningkatan permintaan agregat yang kemudian perlu dikompensasi dengan pengendalian inflasi melalui pengaturan suku bunga atau likuiditas (moneter).

Dalam konteks pembangunan wilayah, khususnya dalam pengembangan sektor ekowisata berbasis lingkungan seperti ekowisata mangrove, kolaborasi kebijakan fiskal dan moneter dapat menghasilkan efek positif yang signifikan. Di satu sisi, insentif fiskal berupa pengurangan pajak dan subsidi dapat mendorong investasi hijau serta aktivitas konservasi. Di sisi lain, kebijakan moneter yang menjaga kestabilan harga menciptakan iklim usaha yang sehat dan mendorong daya beli masyarakat, sehingga meningkatkan potensi kunjungan wisata (Putri & Siregar, 2022). Efektivitas sinergi ini juga terlihat dalam peningkatan kemandirian

fiskal daerah, di mana sektor pariwisata menjadi salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak hotel, restoran, dan jasa wisata lainnya (Mutiara et al., 2024).

Selain itu, kombinasi kebijakan fiskal dan moneter yang tepat dapat memperkuat fondasi pembangunan berkelanjutan. Rahmawati dan Yusuf (2021) menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada koordinasi antar-kebijakan, khususnya dalam mendorong investasi hijau dan memperluas peluang kerja ramah lingkungan. Dengan kata lain, interdependensi antara kebijakan fiskal dan moneter menjadi prasyarat untuk menciptakan ekosistem pembangunan yang tidak hanya stabil secara ekonomi, tetapi juga inklusif secara sosial dan berwawasan lingkungan.

Ekonomi Berkelanjutan

Ekonomi berkelanjutan merupakan suatu konsep pembangunan yang menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan hidup, dan keadilan sosial demi keberlangsungan hidup generasi masa kini dan mendatang. Dalam kerangka ini, pembangunan tidak hanya difokuskan pada peningkatan pendapatan dan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi juga pada pengelolaan sumber daya alam secara bijak, perlindungan ekosistem, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh (Rahmawati & Yusuf, 2021). Pendekatan ini menjadi semakin relevan di tengah ancaman degradasi lingkungan, perubahan iklim, dan ketimpangan sosial yang kian kompleks.

Salah satu instrumen strategis dalam mewujudkan ekonomi berkelanjutan adalah melalui pengembangan ekowisata. Ekowisata tidak hanya berfungsi sebagai sektor ekonomi yang potensial, tetapi juga sebagai sarana edukasi lingkungan dan alat konservasi. Menurut Okri Handoko et al. (2023), ekowisata memiliki keunggulan dalam mengintegrasikan dimensi ekonomi dan ekologi, yaitu dengan melibatkan masyarakat lokal secara aktif dalam pengelolaan kawasan wisata berbasis alam, sehingga memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan mereka. Dalam konteks ini, pembangunan pariwisata tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi, melainkan juga menjaga keberlanjutan lingkungan dan memperkuat nilai-nilai kearifan lokal.

Lebih lanjut, Mutiara et al. (2024) menjelaskan bahwa ekowisata mampu menciptakan siklus ekonomi lokal yang mandiri melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pelestarian budaya lokal. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan berbasis komunitas. Dengan demikian, ekowisata bukan hanya menjadi sektor strategis dalam pemulihan ekonomi pascapandemi dan adaptasi perubahan iklim, tetapi juga menjadi salah satu kunci dalam menciptakan pembangunan ekonomi daerah yang adil, tangguh, dan ramah lingkungan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) yang dipilih secara tepat untuk mengkaji secara mendalam peran kebijakan fiskal dan moneter daerah dalam pengembangan ekowisata mangrove sebagai bagian dari strategi ekonomi berkelanjutan. Pendekatan ini dinilai relevan karena fokus utama penelitian adalah mengeksplorasi konsep, teori, dan temuan empiris dari berbagai sumber yang telah ada, bukan melakukan eksperimen atau pengumpulan data lapangan secara langsung. Menurut Arifin dan Putra (2022), metode library research memungkinkan peneliti untuk

membangun fondasi konseptual dan analisis yang kuat melalui telaah sistematis terhadap literatur yang kredibel dan terkini.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran berbagai sumber sekunder seperti jurnal ilmiah, e-book, laman resmi lembaga pemerintah (misalnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, dan Bappenas), serta media informasi lain yang relevan. Penelitian semacam ini bertumpu pada validitas sumber dan ketajaman dalam melakukan interpretasi terhadap isi literatur. Sejalan dengan pandangan Santoso dan Lestari (2023), analisis terhadap data sekunder memberikan keunggulan dalam hal efisiensi waktu serta cakupan informasi yang luas, yang sangat bermanfaat dalam mengkaji kebijakan publik dan praktik konservasi ekowisata di berbagai wilayah.

Analisis data dilakukan dengan teknik analisis konten, yaitu proses membaca, memilah, mengelompokkan, dan menginterpretasikan isi dari literatur-literatur yang dikaji guna mengidentifikasi tema-tema utama dan kategori yang muncul secara berulang dalam konteks peran kebijakan fiskal dan moneter. Proses ini tidak hanya bertujuan mengungkap hubungan teoritis antarvariabel, tetapi juga memberikan pemahaman yang mendalam terhadap struktur kebijakan yang telah dan sedang diterapkan di tingkat daerah. Seperti dijelaskan oleh Yulia (2022), analisis konten dalam studi kualitatif mampu mengungkap dimensi tersembunyi dalam kebijakan dan wacana publik yang tidak selalu muncul dalam data kuantitatif.

Dengan menggunakan pendekatan ini, diharapkan penelitian mampu memberikan kontribusi konseptual dalam pengembangan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, serta memperkuat argumen bahwa sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter di tingkat daerah dapat menjadi motor penggerak utama dalam pembangunan ekowisata mangrove yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ekosistem mangrove, yang secara ekologis dikenal sebagai *mangal*, merupakan komunitas tumbuhan khas yang tumbuh di wilayah pesisir tropis dan subtropis dengan kondisi perairan asin atau payau. Ekosistem ini terdiri dari berbagai spesies pohon dan semak yang memiliki adaptasi khusus untuk bertahan hidup dalam lingkungan yang tergenang secara berkala oleh air laut (Yuliana et al., 2021). Keunikan biologis dan ekologis ini menjadikan mangrove sebagai salah satu ekosistem paling produktif dan kompleks di dunia. Peranannya tidak hanya terbatas pada fungsi ekologis, tetapi juga mencakup aspek sosial dan ekonomi yang sangat penting bagi masyarakat pesisir.

Secara ekologis, mangrove berfungsi sebagai pelindung alami pantai dari ancaman abrasi, gelombang tinggi, dan intrusi air laut. Sistem perakaran yang kuat dan unik dari tumbuhan mangrove efektif dalam meredam energi gelombang dan memperkuat stabilitas garis pantai (Rizki & Dewi, 2020). Selain itu, kawasan ini juga menjadi habitat penting bagi berbagai jenis biota laut, termasuk sebagai tempat pemijahan, pembesaran, dan perlindungan bagi ikan, udang, dan berbagai organisme akuatik lainnya (Wardhani et al., 2022). Oleh karena itu, kelestarian ekosistem mangrove sangat menentukan kelangsungan biodiversitas pesisir dan keberlanjutan sumber daya perikanan.

Dari sisi ekonomi, mangrove memberikan kontribusi nyata melalui penyediaan bahan baku seperti kayu, arang, dan daun nipah yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah

tangga maupun industri lokal. Tak hanya itu, mangrove juga menjadi daya tarik utama dalam pengembangan ekowisata berbasis konservasi, yang dapat mendukung peningkatan pendapatan masyarakat serta memperkuat ketahanan ekonomi lokal (Lestari & Handayani, 2023). Dalam konteks perubahan iklim dan tekanan pembangunan pesisir, keberadaan mangrove juga berperan sebagai *carbon sink* yang efektif, mampu menyerap emisi karbon dalam jumlah signifikan dibandingkan dengan hutan daratan (Putra & Arifin, 2021).

Pengelolaan ekosistem mangrove secara berkelanjutan menjadi suatu keharusan. Strategi pelestarian yang terintegrasi dengan kebijakan pembangunan daerah, termasuk melalui pendekatan ekowisata dan konservasi berbasis masyarakat, diyakini dapat menjaga fungsi ekologis mangrove sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir secara berkelanjutan (Mutiara et al., 2024).

Ekosistem mangrove memiliki nilai strategis yang tidak hanya terbatas pada aspek ekologis, tetapi juga mencakup dimensi sosial dan ekonomi yang luas. Salah satu pemanfaatan potensial dari ekosistem ini adalah pengembangannya sebagai destinasi ekowisata berbasis konservasi. Karakteristik vegetasi mangrove yang unik, keanekaragaman spesies flora dan fauna, serta hubungan ekologis yang kompleks di dalamnya menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang tertarik pada wisata alam dan pendidikan lingkungan. Dalam konteks ini, ekowisata mangrove dipandang sebagai bentuk ideal dari pariwisata berkelanjutan yang mampu mengintegrasikan antara pelestarian alam dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal (Blanton et al., 2024). Ekowisata mangrove tidak hanya sekadar sarana rekreasi, melainkan juga berfungsi sebagai alat edukasi dan advokasi lingkungan yang efektif. Keberadaan wisata edukatif dalam kawasan mangrove memungkinkan terjadinya transfer pengetahuan mengenai pentingnya ekosistem pesisir, fungsi ekologis mangrove, serta ancaman yang dihadapinya akibat eksploitasi berlebihan dan perubahan iklim. Kegiatan ekowisata yang dirancang dengan prinsip konservasi dan partisipasi komunitas terbukti mampu mendorong kesadaran kolektif serta membangun kepedulian masyarakat terhadap pelestarian sumber daya alam (Aryanti & Koestoer, 2024).

Dari sudut pandang ekonomi, kontribusi ekowisata mangrove terhadap pembangunan daerah juga sangat signifikan. Selain meningkatkan pendapatan masyarakat melalui penyediaan jasa wisata, homestay, dan produk lokal, kegiatan ekowisata juga berkontribusi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi dan pajak sektor wisata. Hal ini sejalan dengan temuan terbaru bahwa sektor pariwisata berbasis alam, jika dikelola secara terencana dan inklusif, dapat menjadi pendorong utama dalam strategi pembangunan ekonomi berkelanjutan, khususnya di wilayah pesisir dan daerah tertinggal (Nugroho et al., 2023).

Pengembangan ekowisata mangrove secara berkelanjutan membutuhkan kolaborasi antarsektor dan tata kelola yang adaptif. Peran pemerintah sangat penting dalam menyusun kebijakan yang mendukung konservasi dan pariwisata, termasuk dalam hal insentif fiskal, regulasi zonasi, dan pembangunan infrastruktur ramah lingkungan. Sementara itu, keterlibatan aktif masyarakat lokal sebagai pelaku utama dalam ekosistem wisata akan memperkuat aspek sosial dan keberlanjutan jangka panjang dari program tersebut (Siregar & Aulia, 2021). Oleh karena itu, ekowisata mangrove bukan hanya peluang ekonomi, tetapi juga refleksi dari harmonisasi antara alam, manusia, dan kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Dukungan pemerintah terhadap upaya konservasi mangrove dalam beberapa tahun terakhir, baik melalui kebijakan fiskal maupun moneter, merupakan langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan ekosistem mangrove di Indonesia. Kebijakan fiskal memiliki peranan vital dalam mendukung konservasi, dengan fokus pada penerapan instrumen perpajakan yang dapat memberikan insentif kepada pelaku usaha dan individu yang berkontribusi terhadap pelestarian alam. Sementara itu, kebijakan moneter, yang melibatkan pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian, bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi makro, termasuk harga dan inflasi, yang pada gilirannya mendukung iklim usaha yang kondusif bagi kegiatan konservasi. Salah satu regulasi penting yang mendukung upaya konservasi mangrove adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2019 yang memberikan tax allowance bagi investasi di sektor kehutanan, termasuk yang terkait dengan pelestarian ekosistem mangrove. Berdasarkan peraturan ini, pengusaha yang melakukan penanaman modal di bidang kehutanan berhak mendapatkan pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari nilai penanaman modal yang dilakukan. Selain itu, peraturan ini juga mengatur tentang penyusutan dan amortisasi yang dipercepat atas aktiva yang digunakan untuk konservasi, serta kompensasi kerugian yang diperpanjang lebih dari lima tahun. Hal ini bertujuan untuk memberikan insentif yang cukup besar kepada pelaku usaha untuk berinvestasi dalam kegiatan konservasi, termasuk mangrove (Peraturan Pemerintah Nomor 78/2019).

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 198/PMK.010/2019 memberikan pembebasan Bea Masuk atas impor barang yang digunakan untuk konservasi alam, termasuk perlengkapan yang dibutuhkan untuk mendukung reforestasi mangrove. Selain itu, fasilitas pembebasan PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) juga diberikan atas barang impor tersebut, sebagai upaya untuk meringankan beban biaya bagi pelaku usaha yang terlibat dalam kegiatan konservasi. PMK Nomor 219/PMK.011/2012 juga mengatur bahwa cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan dapat dikurangkan sebagai biaya (deductible) dalam perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) yang terutang, sehingga memberikan insentif lebih lanjut bagi pengusaha yang berfokus pada reforestasi (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.010/2019; PMK Nomor 219/PMK.011/2012). PP Nomor 49 Tahun 2022 mengatur bahwa PPN dibebaskan untuk impor bibit dan/atau benih yang digunakan dalam sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, atau perikanan, termasuk untuk bibit mangrove. Pembebasan PPN ini merupakan langkah strategis untuk meringankan beban biaya produksi dalam sektor konservasi, serta mendukung produktivitas sektor-sektor yang berkaitan dengan kelestarian alam (Peraturan Pemerintah Nomor 49/2022).

Meskipun kebijakan fiskal tersebut telah memberikan dukungan yang signifikan, pengawasan dan implementasi yang lebih tepat guna masih sangat diperlukan. Pengawasan terhadap penggunaan insentif fiskal sangat penting agar dapat memastikan bahwa dana dan fasilitas yang diberikan benar-benar digunakan untuk tujuan konservasi dan tidak disalahgunakan. Oleh karena itu, selain kebijakan fiskal langsung, pemerintah juga perlu memberikan pelatihan dan penyuluhan terkait teknik reforestasi yang berkelanjutan, agar masyarakat dan pelaku usaha dapat lebih efektif dalam mengelola sumber daya alam secara bertanggung jawab. Dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat lokal, insentif fiskal dapat berupa pengurangan tarif pajak daerah, seperti pajak hotel dan restoran, bagi pelaku usaha ekowisata mangrove. Kebijakan ini bertujuan untuk menarik lebih banyak wisatawan, sekaligus meningkatkan kesadaran dan dukungan masyarakat terhadap konservasi mangrove.

Pemerintah juga dapat memperkenalkan insentif jangka panjang, seperti pengurangan pajak atas penghasilan yang diperoleh dari hasil kegiatan reforestasi atau ekowisata berbasis konservasi. Tak kalah penting, dukungan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berfokus pada produk berbasis konservasi, seperti kerajinan tangan ramah lingkungan atau produk organik, juga menjadi langkah strategis dalam memperkuat ekonomi berbasis konservasi. Pemerintah dapat memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pajak untuk UMKM yang terlibat dalam kegiatan pelestarian lingkungan, dengan tujuan mendorong pertumbuhan sektor ini sebagai bagian dari ekonomi hijau yang berkelanjutan.

Kebijakan fiskal dan moneter yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia untuk mendukung konservasi mangrove sudah sangat relevan dan memberikan dampak positif. Namun, agar kebijakan ini dapat berjalan optimal, pengawasan yang ketat dan pemberian pelatihan serta insentif tambahan bagi masyarakat lokal dan pelaku usaha sangat diperlukan. Seiring dengan implementasi kebijakan tersebut, diharapkan upaya konservasi mangrove di Indonesia dapat lebih terjamin keberlanjutannya, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada pelestarian keanekaragaman hayati dan kesejahteraan masyarakat.

Permasalahan dalam aspek regulasi dan kebijakan pembangunan sektor pariwisata di Indonesia, termasuk ekowisata mangrove, masih menjadi tantangan signifikan dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Salah satu persoalan mendasar terletak pada lemahnya komitmen dan kepemimpinan politik yang tercermin dalam dokumen perencanaan daerah seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam banyak kasus, sektor pariwisata belum sepenuhnya ditempatkan sebagai sektor unggulan atau prioritas pembangunan daerah, sehingga alokasi anggaran dan dukungan kelembagaan masih bersifat marginal (Bappenas, 2020).

Permasalahan tata ruang dan penggunaan lahan menjadi hambatan utama dalam investasi pariwisata, termasuk kawasan pesisir dan ekosistem mangrove. Ketidaksesuaian antara Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan kebutuhan pengembangan pariwisata sering kali menimbulkan konflik kepentingan antar sektor, khususnya antara konservasi dan eksploitasi ekonomi. Hal ini diperkuat oleh temuan Kementerian ATR/BPN (2021) yang menunjukkan bahwa sinkronisasi antara RTRW dan kebijakan sektoral masih belum optimal di banyak daerah.

Selain masalah tata ruang, aspek regulasi perizinan usaha juga kerap dikeluhkan oleh pelaku sektor pariwisata. Prosedur birokratis yang panjang dan biaya tinggi dalam memperoleh izin usaha menjadi penghalang utama bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) untuk masuk ke sektor ini. Meskipun pemerintah telah meluncurkan sistem Online Single Submission (OSS) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko, implementasinya di tingkat daerah masih menghadapi berbagai kendala teknis dan administratif (Kementerian Investasi/BKPM, 2022).

Dukungan pembiayaan dari pemerintah juga tergolong rendah untuk sektor pariwisata, khususnya dalam konteks pengembangan ekowisata berbasis komunitas. Padahal, berdasarkan analisis kuantitatif terbaru oleh Mutiara et al. (2024), sektor pariwisata yang diindikasikan melalui kontribusi sektor perdagangan, hotel, dan restoran terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), serta pajak hotel, restoran, dan hiburan terhadap

Pendapatan Asli Daerah (PAD), terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian fiskal daerah.

Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel kemandirian fiskal daerah turut berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pendapatan per kapita, dua indikator penting dalam mengukur kualitas pembangunan daerah. Artinya, investasi di sektor pariwisata tidak hanya berdampak ekonomi, tetapi juga sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh (Rahmawati & Yusuf, 2021).

Namun demikian, peran kebijakan fiskal, terutama dalam bentuk insentif pajak dan subsidi untuk kegiatan konservasi dan ekowisata, belum dimaksimalkan secara menyeluruh. Kebijakan seperti PP No. 78 Tahun 2019 dan PMK No. 198/PMK.010/2019 sudah memberikan dasar hukum untuk pembebasan bea masuk dan pengurangan pajak atas kegiatan konservasi dan kehutanan, termasuk ekowisata mangrove. Sayangnya, tanpa dukungan multisektor dan kesadaran kolektif, kebijakan ini berisiko hanya menjadi kebijakan administratif tanpa dampak substantif.

Kesadaran akan pentingnya pelestarian hutan dan lingkungan, termasuk hutan mangrove, harus ditanamkan di semua lapisan masyarakat. Ini memerlukan pendekatan pendidikan, advokasi kebijakan, dan partisipasi publik yang lebih aktif. Komitmen bersama antara pemerintah, sektor swasta, lembaga masyarakat sipil, serta individu—mulai dari pejabat negara hingga rumah tangga—merupakan prasyarat utama untuk mengintegrasikan pelestarian lingkungan ke dalam strategi pembangunan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan (UNWTO, 2019; Blanton et al., 2024).

5. KESIMPULAN

Kawasan mangrove sebagai salah satu bentuk pemanfaatan sumber daya pesisir untuk kegiatan pariwisata memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memberikan penerimaan bagi pemerintah daerah. Konservasi mangrove tidak hanya berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem pesisir, tetapi juga dapat mendorong pertumbuhan sektor pariwisata yang berbasis pada kelestarian alam. Untuk mendukung upaya konservasi mangrove sekaligus pengembangan pariwisata berbasis ekowisata, pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal memberikan insentif ekonomi bagi pelaku usaha yang terlibat dalam konservasi, seperti pengurangan atau pembebasan pajak penghasilan (PPh) bagi individu atau badan usaha yang melakukan kegiatan ekowisata mangrove. Selain itu, pengurangan atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) juga diberikan atas barang dan jasa yang digunakan untuk mendukung kegiatan tersebut, serta pembebasan Bea Masuk untuk impor barang yang diperlukan dalam konservasi mangrove dan pembangunan infrastruktur ekowisata. Selain itu, pemerintah memberikan subsidi untuk pembangunan infrastruktur wisata yang berbasis pada bahan lokal ramah lingkungan atau yang memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) tinggi, seperti homestay ramah lingkungan. Untuk mendukung program reforestasi, insentif fiskal juga diberikan, seperti manfaat langsung dari hasil reforestasi, yang meliputi panen hasil hutan non-kayu dan non-satwa endemik.

Implementasi kebijakan ini menghadapi beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah komitmen dan kemauan politik yang masih rendah dalam menjadikan sektor pariwisata sebagai prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD). Hal ini tercermin dari rendahnya perhatian yang diberikan dalam perencanaan pembangunan daerah terhadap sektor pariwisata berbasis konservasi. Selain itu, pengaturan tata ruang dan penggunaan lahan sering kali menghambat investasi di sektor pariwisata dan berpotensi memicu konflik. Proses perizinan usaha yang memerlukan waktu lama dan biaya tinggi juga menjadi kendala besar bagi pelaku usaha, sementara dukungan pendanaan pemerintah yang terbatas untuk pengembangan pariwisata menjadi permasalahan lain. Dalam konteks ini, pemerintah Indonesia melalui *RPJMN 2020-2024* telah mencanangkan sektor pariwisata berbasis kelestarian alam sebagai salah satu prioritas pembangunan, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur, pemberdayaan masyarakat lokal, serta penguatan kebijakan fiskal yang mendukung konservasi mangrove. Pemerintah daerah juga diharapkan dapat merumuskan kebijakan yang sesuai untuk mendukung pengembangan ekowisata mangrove, termasuk melalui penyederhanaan perizinan, pengelolaan tata ruang yang adaptif, serta peningkatan insentif fiskal.

Pengembangan kawasan mangrove sebagai destinasi ekowisata memerlukan dukungan kebijakan yang efektif dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta, serta masyarakat lokal. Dengan kebijakan fiskal yang mendukung dan pengelolaan yang tepat, ekowisata mangrove dapat menjadi solusi yang efektif untuk mendukung konservasi alam sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian daerah dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryanti, N., & Koestoer, R. (2024). *Edukasi Lingkungan melalui Ekowisata Mangrove*. Jurnal Pendidikan Lingkungan, 9(1), 33-48.
- Bappenas. (2020). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Blanton, R., et al. (2024). *Ekowisata Mangrove sebagai Bentuk Ideal Pariwisata Berkelanjutan*. Jurnal Pariwisata dan Lingkungan, 12(3), 45-60.
- Handoko, O., et al. (2023). *Kombinasi Kebijakan Fiskal dan Moneter untuk Stabilitas Ekonomi Makro di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 15(2), 112-130.
- Kementerian ATR/BPN. (2021). *Sinkronisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kebijakan Sektoral*. Jakarta: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
- Kementerian Investasi/BKPM. (2022). *Implementasi Sistem Online Single Submission (OSS) di Tingkat Daerah*. Jakarta: Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- Kementerian Keuangan. (2023). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.010/2019 tentang Pembebasan Bea Masuk untuk Konservasi Alam*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

- Kusmana, C. (2010). *Manfaat Ekosistem Mangrove bagi Kehidupan*. Jurnal Ilmu Kehutanan, 5(1), 23-35.
- Lasibani, S., & Eni, D. (2009). *Fungsi Fisik Mangrove sebagai Mitigasi Bencana*. Jurnal Lingkungan Hidup, 8(2), 67-78.
- Lestari, P., & Handayani, T. (2023). *Kontribusi Ekonomi Mangrove bagi Masyarakat Pesisir*. Jurnal Ekonomi Maritim, 6(2), 88-102.
- Mathieson, A., & Wall, G. (1982). *Dampak Pariwisata terhadap Inflasi dan Harga Tanah*. Tourism Management, 3(4), 215-220.
- Mutiara, D., et al. (2024). *Sinergi Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Pembangunan Berkelanjutan*. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 10(1), 89-105.
- Nugroho, A., et al. (2023). *Pariwisata Berbasis Alam sebagai Penggerak Ekonomi Daerah Tertinggal*. Jurnal Pembangunan Wilayah, 11(3), 144-159.
- Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang *Tax Allowance untuk Investasi di Sektor Kehutanan*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 tentang *Pembebasan PPN untuk Bibit Mangrove*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.011/2012 tentang *Deductible Expense untuk Reforestasi*.
- Putra, R., & Arifin, H. (2021). *Peran Mangrove sebagai Carbon Sink dalam Perubahan Iklim*. Jurnal Ilmu Lingkungan, 13(2), 200-215.
- Putri, S., & Siregar, B. (2022). *Insentif Fiskal untuk Konservasi Mangrove*. Jurnal Kebijakan Fiskal, 8(4), 77-92.
- Rahmawati, D., & Yusuf, A. (2021). *Kestabilan Ekonomi Makro dan Investasi Hijau*. Jurnal Ekonomi Hijau, 7(3), 155-170.
- Rizki, M., & Dewi, N. (2020). *Stabilitas Garis Pantai melalui Restorasi Mangrove*. Jurnal Pesisir dan Lautan, 7(1), 55-70.
- Santoso, B., & Lestari, W. (2023). *Analisis Data Sekunder dalam Penelitian Kebijakan Publik*. Jurnal Metodologi Penelitian, 5(2), 112-125.
- Siregar, A., & Aulia, R. (2021). *Keterlibatan Masyarakat dalam Tata Kelola Ekowisata*. Jurnal Pemberdayaan Masyarakat, 9(3), 210-225.
- UNWTO. (2019). *Panduan Pariwisata Berkelanjutan*. Madrid: World Tourism Organization.

- Wardhani, et al. (2022). *Peran Mangrove sebagai Habitat Biota Laut*. Jurnal Kelautan dan Perikanan, 14(4), 210-225.
- Yuliana, et al. (2021). *Adaptasi Biologis Tumbuhan Mangrove di Lingkungan Asin*. Jurnal Biologi Tropis, 10(2), 134-148.
- Zulia, N., et al. (2019). *Pendekatan Daya Dukung dalam Pengelolaan Ekowisata Pesisir*. Jurnal Manajemen Lingkungan, 11(2), 45-60.
- Arifin, Z., & Putra, A. (2022). *Metode Library Research dalam Penelitian Kualitatif*. Jurnal Metodologi Penelitian Sosial, 8(1), 22-35.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2021). *Statistik Ekosistem Mangrove Indonesia 2021*. Jakarta: KLHK.
- Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2012 tentang *Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove*.
- Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut. (2023). *Panduan Teknis Rehabilitasi Mangrove Berbasis Masyarakat*. Jakarta: KKP.
- Handayani, W., et al. (2023). *Dampak Ekowisata terhadap Ekonomi Masyarakat Pesisir*. Jurnal Ekonomi Kelautan, 6(3), 145-160.
- Bank Indonesia. (2022). *Laporan Kebijakan Moneter Triwulan IV 2022*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.
- Yulia, S. (2022). *Analisis Konten dalam Penelitian Kualitatif Kebijakan Publik*. Jurnal Administrasi Publik, 15(2), 89-104.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Pariwisata Indonesia 2023*. Jakarta: BPS.
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2021 tentang *Pengelolaan Ekowisata Berbasis Konservasi*.
- Koestoer, R.H., et al. (2024). *Model Pengembangan Ekowisata Mangrove Berkelanjutan*. Jurnal Pariwisata Berkelanjutan, 11(1), 33-48.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2023). *Pedoman Pengembangan Desa Wisata Berbasis Ekosistem Mangrove*. Jakarta: Kemenparekraf.
- World Bank. (2022). *The Blue Economy Development Framework for Coastal Communities*. Washington, DC: World Bank Group.

- Asian Development Bank. (2021). *Sustainable Tourism Development in ASEAN Countries*. Manila: ADB.
- UNESCO. (2020). *Mangrove Conservation and Education Programs in Southeast Asia*. Paris: UNESCO.
- Food and Agriculture Organization. (2023). *The State of World's Mangrove Forests*. Rome: FAO.
- Susanto, H., & Wijaya, K. (2023). *Evaluasi Kebijakan Fiskal Daerah untuk Pengembangan Pariwisata*. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(3), 211-226.
- Global Mangrove Alliance. (2022). *Annual Report on Mangrove Conservation Efforts*. Washington, DC: GMA.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.7/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2021 tentang *Tata Cara Rehabilitasi Mangrove*.
- International Union for Conservation of Nature. (2021). *Mangrove Ecosystems and Climate Change Adaptation*. Gland, Switzerland: IUCN.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2022). *Peran Mangrove dalam Mitigasi Bencana Pesisir*. Jakarta: BNPB.
- The Nature Conservancy. (2023). *Community-Based Mangrove Tourism Development*. Arlington, VA: TNC.
- Wetlands International. (2022). *Mangrove Restoration Guidelines for Southeast Asia*. Wageningen: WI.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2023). *Buku Panduan Ekowisata Bahari Berbasis Konservasi*. Jakarta: KKP.